REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN 4
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Per TW	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilaksanakan untuk Pencapaian Kinerja	Per TW	Target	Realisasi	Capaian	Hambatan/ Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah/ Harus Dilaksanakan	Program		Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Ket
1	2	3		4	5	6	0					8	9	10		11	12	13	14	15	17
1.	Meningkatnya Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Dearah provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 0 3,4	0 0	0 0	1. Melakukan Pengembangan Aplikasi/Website; 2. Melakukan penilaian mandiri Indeks SPBE Tahun 2024; 3. Melakukan reviu layanan OPD; 4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan UPI (YPTK) Padang dan PT. Semen Padang terkait Peningkatan SPBE;	TW 4	3.4	3.7	109%	Penyelenggaraan SPBE belum didukung dengan regulasi yang komprehensif dan selaras dengan Kebijakan Pusat	Menyusun regulasi yang sinkron dengan Pemerintah Pusat	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE	3.76	**Rp 9,293,496,755**	Rp 10,033,896,128	
		2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 0 3,8	0 0	0 0			3.8	3.8	100%										
		3. Indeks Domain Layanan SPBE;	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 0 4,26	0 0	0 0			4.26	4.26	100%										
		4. Indeks Domain Manajemen SPBE.	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 0 2,6	0 0	0 0			2.6	2.91	111.92										
2.	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Informasi (KAMI)	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 0 66%	0 0	0 0	1. Melakukan penerbitan Tanda Tangan Elektronik pada RSUD dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2. Melakukan sosialisasi menuju ISO SNI 270001 kepada OPD se-Provinsi Sumatera Barat. 3. Melakukan penyusunan SOP Keamanan Informasi Publik. 4. Melakukan penilaian mandiri Indeks KAMI tahun 2024.	Tw 4	1300 1 kali 1 dok 20 dok	1500 1 kali 1 dok 20 dok	115,38% 100% 100% 100%	Tidak ada	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keamanan Informasi	66%	-	Rp 452,000,000	Nilai Indeks KAMI akan diterbitkan oleh BSSN pada TW 4
															2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	51 OPD	51 OPD	Rp 65,000,000	
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 40% 80%	0 0	0 0 0	1. Melakukan audiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan BPS untuk perencanaan EPSS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.	Tw 4	1 kali 1 kali 1 kali	1 kali 1 kali 1 kali	100% 100% 100%	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase ketersedia data statistik sektoral	-	-	Rp 465,000,000	
		Persentase OPD yang memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	20% 35% 70% 81%	20% 35%	100% 100%	2. Melakukan verifikasi PDRB Tahun 2024. 3. Melakukan penilaian mandiri EPSS Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 4. Mengikuti penilaian EPSS bersama Tim Penilai EPSS Nasional.	Tw 4	1 dok 1 kali 1 kali	1 dok 1 kali 1 kali	100% 100% 100%	Tidak ada	-					35%	35%		
4.	Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 0 30%	0 0	0 0	Menyusun tim; pembagian tugas dan melaksanakan rapat awal masing-masing Sub Kegiatan; menyusun KAK; jadwal kegiatan; Surat Keputusan (SK) pengelola sub kegiatan; update SOP layanan publik. Menugaskan tim melakukan pengumpulan data dari beberapa narasumber untuk membuat siaran pers dan / konten informasi; mempersiapkan jumpa pers dengan media lektronik, online dan cetak Menugaskan tim untuk membuat rilis/berita, flayer, infografis dan foto jurnalistik dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pimpinan. Menyunting naskah siaran pers dan konten informasi lainnya; Melaporkan Rilis Berita / konten informasi lainnya yang siap diterbitkan kepada Pimpinan	Tw 4	30%	30%	100%	1. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pembuatan konten informasi; 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran; 3. Potensi banyak kegiatan yang tidak bisa dibayarkan, karena GU akhir tahun tidak mencukupi untuk pembayaran	1. Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan pengadaan perangkat pendukung; 2. Telah dilaksanakannya peliputan kegiatan unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah berupa kegiatan expose berita ke media yaitu media cetak dan media elektronik serta media sosial seperti instagram,	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	30%	30%	Rp 10,256,452,080	

							Melayani permintaan zoom meeting, live streaming; publikasi melalui media informasi luar ruang Menyiapkan administrasi pencairan Hibah operasional KPID Termyn I dan II Layanan Informasi Publik terkait dengan Keterbukaan Informasi dan Layanan Pengaduan melalui Aplikasi SPAN LAPOR Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Rakor PPID; Workshop Penyusunan DIP & DIK dan Rakor Pengaduan (SPAN LAPOR) Menyiapkan adminsitrasi dan pelaksanaan Pengadaan 1 unit Videotron indoor Menyiapkan administrasi dan melaksanakan publikasi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak Menyusun laporan masing-masing Sub Kegiatan		1 kali 1 kali	1 kali 1 kali	100% 100%	pembayaran kegiatan yang sudah dilakukan.	seperti instagram, youtube dan tiktok.										
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 BB(73)	0 BB (73,42)	0 100,5%	1. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berserta perubahan; 2. Melakukan evaluasi kinerja internal; 3. Mengikuti evaluasi Sakip Tahun 2024;	Tw 2	2 dok 1 dok 1 dok	2 dok 1 dok 1 dok	100% 100% 100%	Tidak ada	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sisnkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	Rp	293,071,900	
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	TW 1 TW 2 TW 3 TW 4	0 0 0 92%	0	0	-	-	-	-	-	-	-		2.	Administrasi Keuangan	Persentase	55 orang/bulan	55 orang/bulan	Rp	9,598,010,566	
															3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD	2 dok, 6 unit	2 dok, 6 unit	Rp	187,004,750	
															4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian dan kapasitas	100%	100%	Rp	146,248,000	
															5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrsi umum perangkat daerah	100%	100%	Rp	1,715,002,852	
															6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang di sediakan	1 paket	-	Rp	91,567,600	
															7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	Rp	1,901,581,205	
															8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah dengan kondisi baik	100%	100%	Rp	441,625,000	

Padang, Desember 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Nip. 19670928 199203 2 002

REALISASI RENCANA AKSI SEKRETARIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN 4 TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja 2025	Realisasi Trw-4	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilaksanakan	Program		Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (73)	BB (73,42)	100,56%	1. Mengkoordinir penyusunan dokumen pengukuran kinerja dan laporan kinerja 2. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan; 3. Melakukan evaluasi kinerja internal	1. Belum lengkapnya dokumen pendukung evaluasi, reviu dan penilaian lainnya;; 2. Tidak adanya petugas khusus yang menangani monitoring, evaluasi dan pelaporan (mutasi)	1. Melengkapi dokumen pendukung evaluasi, review dan penilaian lainya 2. Merekrut petugas khusus untuk menangani monitoring, evaluasi dan pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%; 5 Dok	3 Dok	Rp234.166.900	Rp147.751.010	63,10%
										2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian realisasli keuangan perangkat daerah	85 orang/ bulan	85 orang/ bulan	Rp9.720.578.150	Rp8.273.168.821	85,11%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	92%	84%	91%	1. Melakukan review terhadap hasil penilaian survey tingkat kepuasan pelayanan internal organisasi tahun sebelumnya	1. Banyaknya penambahan indikator dalam metode survey baru yang menggunakan aplikasi berdampak capaian pada target yang ditetapkan	1. Melakukan inventarisasi dan identikasi tambahan indikator baru dalam survey kepuasan dan mengantisipasi serta melengkapinya dalam pelayanan internal organisasi		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD	2 dok, 6 unit	1 Dok, 2 Unit	Rp205.390.485	Rp137.899.388	67,14%
										4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian dan kapasitas sumberdaya aparatur	6 orang / Pegawai	0	Rp171.476.000	Rp136.575.714	79,65%
										5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrsi umum perangkat daerah	12 Lap.	3 Lap	Rp2.308.132.632	Rp2.196.942.097	95,18%
										6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket barang BMD yang di sediakan	7 paket	0	Rp380.220.000	Rp8.920.000	2,35%
										7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 paket / bulan	2 paket / bulan	Rp1.791.145.411	Rp1.376.330.562	76,84%
										8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah dengan kondisi baik	100% (9 Unit)	22% (2 Unit)	Rp705.313.828	Rp285.762.235	40,52%

Padang, 31 Desember 2024
SEKRETARIS

ONI FAJAR SYAHDI, MMA
NIP. 19670928 199203 2 002

REALISASI RENCANA AKSI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilaksanakan	Program	Kegiatan	Indikator Output	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatkannya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya aplikasi layanan publik dan layanan pemerintahan	1	1	100%	1. Melakukan Pengembangan Aplikasi sesuai dengan SOP 2. Pemeliharaan Aplikasi dan Website	OPD yang meminta aplikasi belum menyerahkan KAK permintaan aplikasi	Menunggu KAK pembangunan aplikasi dari OPD terkait	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Indeks SPBE	3,4	3,85	##############	Rp9.293.496.755	92,62%
		Ketersediaan Jaringan Intra dan Internet Pemprov Sumbar	1	1	100%	1. Monitoring rutin pemanfaatan akses internet ke OPD 2. Pemeliharaan rutin infrastruktur Jaringan OPD										
		Ketersediaan Akses Internet di SMA/SMK/SLB di Kab/Kota	1	1	100%	Pemeliharaan dan monitoring akses internet di SLTA/SMK/SLB										
		Terselenggaranya Monev Ekosistem SPBE	1	1	100%	1. Melakukan konsultasi SPBE ke kementerian terkait 2. Melakukan pembinaan SPBE ke Diskominfo Kab/Kota										
		Tersusunnya Regulasi Tata Kelola SPBE	1	1	100%	1. Finalisasi Harmonisasi Ranperda SPBE dengan Kanwil Hukum HAM 2. Pembahasan Ranperda SPBE/Pemdi dengan DPRD 3. Melakukan Reviu Arsitektur SPBE dan pembuatan SK Arsitektur SPBE	Pemerintah Pusat sedang menyusun Perpres tentang Pemerintah Digital	Muatan pasal pada Ranperda SPBE akan disesuaikan dengan Perpres Pemerintah Digital									
		Terselenggaranya pengelolaan Sistem Elektronik	1	1	100%	1. Inventaris data subdomain aplikasi dan website 2. Koordinasi dengan OPD pengelola aplikasi untuk data dukung PSE 3. Mendaftarkan aplikasi ke layanan.kominfo.go.id	Data dukung pembangunan aplikasi tidak lengkap dari OPD seperti regulasi, SOP dan SK pengelolaan aplikasi	Meminta OPD terkait menyediakan data dukung PSE								

Padang, 31 Desember 2024

Kepala Bidang Aplikasi Informatika

LIZDA HANDAYANI, M.Kom

NIP. 19750121202122001

Lampiran I
Surat Nomor : 005/ /Diskominfotik-2024
Tanggal : Desember 2024

REALISASI RENCANA AKSI KEPALA BIDANG IKP
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilaksanakan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Tersedianya informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah	Jumlah Informasi Kebijakan, Program Prioritas dan Strategis Pemerintah yang Tersedia	90%	90%	100%	1 Menyusun tim; pembagian tugas dan melaksanakan rapat awal masing-masing Sub Kegiatan; menyusun KAK, jadwal kegiatan; Surat Kepulusan (SK) pengelola sub kegiatan; update SOP layanan publik. 2 Menugaskan tim melakukan pengumpulan data dari beberapa narasumber untuk membuat siaran pers dan / konten informasi; mempersiapkan jumpa pers dengan media lektronik, online dan cetak 3 Menugaskan tim untuk membuat rilis/berita, Reyee, infografik dan foto jurnalistik dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pimpinan. 4 Menyunting naskah siaran pers dan konten informasi lainnya; Melaporkan Rilis Berita / konten informasi lainnya yang siap diterbitkan kepada Pimpinan 5 Melayani permintaan zoom meeting, live streaming; publikasi melalui media informasi luar ruang 6 Menyiapkan administrasi pencairan Hibah operasional KPID Termyn I dan II 7 Layanan Informasi Publik tertuk dengan Keterbukaan Informasi dan Layanan Pengaduan melalui Aplikasi SPAN LAPOR 8 Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Rakor PPID; Workshop Penyusunan DIP & DIK dan Rakor Pengaduan (SPAN LAPOR) 9 Menyiapkan administrasi dan pelaksanaan Pengadaan 1 unit Videotron indoor 10 Menyiapkan administrasi dan melaksanakan publikasi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak 11 Menyusun laporan masing-masing Sub Kegiatan	1. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pembuatan konten informasi; 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran; 3. Potensi banyak kegiatan yang tidak bisa dibayarkan, karena GU akhir tahun tidak mencukupi untuk pembayaran kegiatan yang sudah dilakukan.	1. Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan pengadaan perangkat pendukung; 2. Telah dilaksanakannya pelipatan kegiatan unsur pimpinan daerah dan perangkat daerah berupa kegiatan expose berita ke media yaitu media cetak dan media elektronik serta media sosial seperti instagram, youtube dan tiktok.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	14,994,400	3,765,000	25.11%
										2. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	183,988,200	151,503,000	82.34%
										3. Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	14,900,000	1,155,000	7.75%
										4. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	739,215,300	664,262,720	89.86%
										5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	6,852,522,622	5,914,738,750	86.31%
										6. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik	3 Layanan	3 Layanan	171,000,000	156,160,409	91.32%
										7. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Dokumen	1 Dokumen	87,558,200	62,127,200	70.96%
										8. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	38,299,000	36,984,000	96.57%
										9. Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen	10,820,500	1,925,000	17.79%
										10. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meneglat Kapasitasnya	300 orang	2 Orang	25,757,000	24,429,000	94.81%
										11. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2,065,836,858	1,750,432,979	84.79%
										12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	51,500,000	46,840,000	90.95%

Padang, Desember 2024
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Indra Gukma, S.Kom
Nip. 19[illegible]0303 199803 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

REALISASI RENCANA AKSI (KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Terget Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilaksanakan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pemanfatan data Statistik Sektoral	1. Melaksanakan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendapatkan hasil data yang akurat, mutakhir, terpadu, valid, dan dibagipakaikan kepada Lembaga Pusat, OPD, dan masyarakat	51	49	96%	1. Survey Data Statistik untuk Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Penyediaan aplikasi pengumpulan data statistik sektoral	1. Keterlambatan dan data kegiatan statistik sektoral OPD tidak lengkap 2. Peran Walidata pendukung belum optimal	1) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan statistik sektoral; 2) Meningkatkan Koordinasi dengan OPD dan BPS; 3) Penambahan tenaga Statistisi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	51	49	Rp 60,290,000	Rp 58,989,115	73.47%
		2. Membangun metadata statistik sektoral	1	1	100%	1. Mengumpulkan metadata sektoral; 2. Melaksanakan kegiatan verifikasi metadata statistik sektoral; 3. Memeriksa dan input metadata statistik sektoral	1. Keterlambatan dan data kegiatan statistik sektoral OPD tidak lengkap 2. Peran Walidata pendukung belum optimal	1) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan statistik sektoral; 2) Meningkatkan Koordinasi dengan OPD dan BPS; 3) Penambahan tenaga Statistisi			Jumlah dokumen metadata statistik sektoral yang diajukan OPD	1	1	Rp 22,047,000	Rp 22,047,000	100.00%
		3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	2	2	100%	1. Mengumpulkan data sektoral; 2. Melaksanakan kegiatan verifikasi data statistik sektoral; 3. Melaksanakan supervisi ke OPD/Kab/Kota.	1. Keterlambatan dan data kegiatan statistik sektoral OPD tidak lengkap 2. Peran Walidata pendukung belum optimal	1) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan statistik sektoral; 2) Meningkatkan Koordinasi dengan OPD dan BPS; 3) Penambahan tenaga Statistisi			Jumlah kompilasi produk administrasi statistik sektoral	2	2	Rp 93,200,000	Rp 88,570,335	95.03%
		4. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100	100	100%	Melakukan Sosialisasi/ Pembinaan/ Bimtek Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Keterlambatan dan data kegiatan statistik sektoral OPD tidak lengkap 2. Peran Walidata pendukung belum optimal	1) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan statistik sektoral; 2) Meningkatkan Koordinasi dengan OPD dan BPS; 3) Penambahan tenaga Statistisi			Terlaksananya Pembinaan dengan Workshop dan Bimbingan Teknis SDI	100	100	Rp177,661,700	Rp 152,068,905	85.59%

Padang, Desember 2024
KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL

Drs. MUJYADI, MM
NIP. 19[illegible]001011989021004

REALISASI RENCANA AKSI BIDANG SIBER DAN SANDI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN 1 TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pengelolaan Siber dan Sandi untuk Pengamanan Informasi	1. Tingkat Ketersiapan Keamanan Informasi	-	-	-	1. Melakukanlah monitoring dan pemantauan anomali server; 2. Melakukan pemanggaran insiden; 3. Membuat laporan penanganan insiden; 4. Melakukan rapat pembahasan penanganan insiden;	Belum optimalnya monitoring dan pemantauan anomali lapisan siber; Belum optimalnya penanganan insiden	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap pengamanan keamanan informasi;	Program Penyelenggaraan Pemandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Pemandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	25%	Rp 286.824.784	Rp 31.629.000	31%
		2. Tingkat Ketersiapan Keamanan Siber	-	-	-	1. Melakukanlah monitoring dan pemantauan keamanan siber; 2. Melakukan pemanggaran insiden; 3. Membuat laporan penanganan insiden; 4. Melakukan rapat pembahasan penanganan insiden;	Belum optimalnya monitoring dan pemantauan anomali lapisan siber; Belum optimalnya penanganan insiden	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap pengamanan keamanan informasi 2. Melakukan perbaikan pengamanan signifikan keamanan informasi			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100%	25%	Rp 48.041.700	-	9%
		3. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Pemandian	-	-	-	1. Melakukan pemantauan pemandian; 2. Melaksanakan urusan pemandian; 3. Melakukan evaluasi pemandian.	Belum optimalnya pemantauan pemandian Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemandian	Melakukan evaluasi berkala pemantauan urusan pemandian Melakukan evaluasi berkala pelaksanaan urusan pemandian								
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah Secara Aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Elektronik secara aktif	55	55	100%	1. Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik; 2. Layanan Pembaharuan Tanda Tangan Elektronik; 3. Layanan Mutasi Tanda Tangan Elektronik; 4. Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik.	Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi para guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi para guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi para guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi para guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat	Melaksakan perbaikan teknam dan alur penerbitan sertifikat elektronik di lingkup Provinsi Sumatera Barat								
3.	Meningkatnya Jumlah Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi	3	3	100%	1. Menyediakan layanan keamanan informasi; 2. Memfasilitasi layanan keamanan informasi; 3. Memberikan layanan keamanan informasi;	Terbatasnya pelayanan keamanan informasi Terbatasnya pelayanan keamanan informasi Terbatasnya pelayanan keamanan informasi	Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi								

Padang, Maret 2024
Kabid Siber dan Sandi

Eko Paisal, S. Kom., MM
NIP. 19691125 199503 1 004

REALISASI RENCANA AKSI BIDANG SIBER DAN SANDI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN 2 TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Siber dan Sandi untuk Pengamanan Informasi	1. Tingkat Ketersiapan Keamanan Informasi	-	-	-	1. Melakukanlah monitoring dan pencatatan anomali server; 2. Melakukan penanganan insiden; 3. Membuat laporan penanganan insiden; 4. Melakukan rapat pembahasan penanganan insiden;	Belum optimalnya monitoring dan pencatatan anomali kejadian siber; Belum optimalnya penanganan insiden	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap pengamanan keamanan informasi.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	100% 100%	30% 30%	Rp 451.000.000 Rp 65.000.000	Rp 75.125.200 Rp -	16,82% #####/#
		2. Tingkat Ketersiapan Keamanan Siber	-	-	-	1. Melakukanlah monitoring dan pencatatan keamanan siber; 2. Melakukan penanganan insiden; 3. Membuat laporan penanganan insiden; 4. Melakukan rapat pembahasan penanganan insiden;	Belum optimalnya monitoring dan pencatatan anomali kejadian siber; Belum optimalnya penanganan insiden	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap pengamanan keamanan informasi 2. Melakukan publikasi penyusunan regulasi keamanan informasi								
		3. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Pemandian	-	-	-	1. Melakukan perencanaan pemandian; 2. Melakukanlah urusan pemandian; 3. Melakukan evaluasi pemandian.	Belum optimalnya perencanaan pemandian Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemandian	Melakukan evaluasi berkala perencanaan urusan pemandian Melakukan evaluasi berkala pelaksanaan urusan pemandian								
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah Secara Aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Elektronik secara aktif	10	10	100%	1. Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik; 2. Layanan Pembaharuan Tanda Tangan Elektronik; 3. Layanan Mutasi Tanda Tangan Elektronik; 4. Layanan Pencabutan Tanda Tangan Elektronik;	Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Sumatera Barat	Melakukan gerakan telusuri dan ajar pemakian sertifikat elektronik di lingkup Provinsi Sumatera Barat								
3.	Meningkatnya Jumlah Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi	3	3	100%	1. Memverifikasi layanan keamanan informasi; 2. Memfasilitasi layanan keamanan informasi; 3. Memberikan layanan keamanan informasi;	Terbatasnya pelayanan keamanan informasi Terbatasnya pelayanan keamanan informasi Terbatasnya pelayanan keamanan informasi	Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi								

Padang, Juni 2024
Kabid Siber dan Sandi

Eko Prikasi, S. Kom., MM
NIP. 19691125 199503 1 004

REALISASI RENCANA AKSI BIDANG SIBER DAN SANDI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TRIWULAN 3 TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pengelanggaran Siber dan Sandi untuk Pengamanan Informasi	1. Tingkat Keamanan Keamanan Informasi	50%	11,50%	23%	1. Melakukankan monitoring dan pemantauan anomali server;	Belum optimalnya monitoring dan pemantauan anomali kejahatan siber;	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap pengamanan keamanan informasi	Program Penyelenggaraan Pemandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Pemandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	87%	20%	Rp 722.718.654	Rp 166.279.286	51,61%
						2. Melakukan pemanggilan insiden;	Belum optimalnya pemanggilan insiden									
						3. Membuat laporan penanganan insiden.;										
						4. Melakukan upaya pembuhuan pemanggilan insiden.										
		2. Tingkat Keamanan Keamanan Siber	71%	69%	97%	1. Melakukankan monitoring dan pemantauan keamanan siber;	Belum optimalnya monitoring dan pemantauan anomali kejahatan siber;	1. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus terhadap pengamanan keamanan informasi		2. Pemetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerahyang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	85%	7%	Rp 5.030.000	Rp 4.727.209	67,05%
						2. Melakukan pemanggilan insiden.	Belum optimalnya pemanggilan insiden	2. Melakukan perbaikan penyusunan regulasi keamanan informasi								
						3. Membuat laporan penanggilan insiden.										
						4. Melakukan upaya pembuhuan pemanggilan insiden.										
		3. Tingkat Kapatuhan Pelaksanaan Pemandian	80%	80,57%	100%	1. Melakukan pemeriksaan pemandian.	Belum optimalnya pemeriksaan pemandian	Melakukan evaluasi berkala pemeriksaan urusan pemandian								
						2. Melakukankan urusan pemandian.	Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemandian	Melakukan evaluasi berkala pelaksanaan urusan pemandian								
						3. Melakukan evaluasi pemandian.										
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah Secara Aktif	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Elektronik secara aktif	12	12	100%	1. Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik;	Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA SMK SLB di Provinsi Sumatera Barat	Melakukan perbaikan tatanan dan alur penerbitan sertifikat elektronik di lingkup Provinsi Sumatera Barat								
						2. Layanan Pembaharuan Tanda Tangan Elektronik;	Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA SMK SLB di Provinsi Sumatera Barat									
						3. Layanan Mutasi Tanda Tangan Elektronik;	Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA SMK SLB di Provinsi Sumatera Barat									
						4. Layanan Pemusnahan Tanda Tangan Elektronik.	Belum optimalnya jangkauan pelayanan bagi guru guru SMA SMK SLB di Provinsi Sumatera Barat									
3.	Meningkatnya Sandi Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Layanan Keamanan Informasi	1	2	200%	1. Memanfaatkan layanan keamanan informasi;	Terbatasnya pelayanan keamanan informasi	Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi								
						2. Memfasilitasi layanan keamanan informasi;	Terbatasnya pelayanan keamanan informasi	Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi								
						3. Memberikan layanan keamanan informasi.	Terbatasnya pelayanan keamanan informasi	Meningkatkan jumlah layanan keamanan informasi								

Padang, September 2024
Kabid Siber dan Sandi

Eka Peksi, S. Kom., MM
NIP. 19691125 199503 1 004

REALISASI RENCANA AKSI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Aksi yang Telah Dilakukan untuk Pencapaian Target Kinerja	Hambatan / Permasalahan Dalam Pencapaian Target	Tindak Lanjut yang Telah / Harus Dilakukan	Program	Kegiatan	Indikator Output	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Administrasi keuangan yang akuntabel & tepat waktu	% laporan SPJ tepat waktu & sesuai regulasi	100%	100%	100%	Penyusunan SPJ rutin & verifikasi	Bukti belanja butuh koordinasi lintas bidang	Koordinasi lebih awal dengan pelaksana								
2.	Kepatuhan pelaporan keuangan tanpa temuan audit	% laporan tanpa temuan BPK/inspektorat	100%	100%	100%	Penyusunan dan penyampaian tepat waktu	Koordinasi lintas unit terkadang lambat	Penjadwalan ulang pelaporan								
3.	Penatausahaan aset yang akurat dan terkini	Jumlah laporan aset (KIB, BAST, rekonsiliasi)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Penyusunan laporan aset lengkap	Dokumen dari bidang belum lengkap	Permintaan percepatan dokumen aset								
4.	Data aset mutakhir & sesuai kondisi fisik	% kesesuaian SIMBAR dan fisik	≥95%	≥95%	≥95%	Opname aset dan update SIMBAR	Sinkronisasi perlu waktu & verifikasi manual	Verifikasi bersama pengelola barang								
5.	Pengawasan internal anggaran dan aset	Jumlah kegiatan reviu internal	4 Kali	4 Kali	4 Kali	Monitoring berkala & pelaporan hasil	Jadwal reviu tumpang tindih kegiatan lain	Jadwal reviu tetap sejak awal tahun								

Padang,
Kasubag Keuangan dan Aset

Putra Bayhaki, SE, MM
NIP 198607012009011001

Dipindai dengan CamScanner